

Analisis dampak Covid-19 terhadap kondisi ekonomi makro dan sosial di Aceh

Analysis of the impact of Covid-19 on macroeconomic and social conditions in Aceh

Naya Desparita^{1✉}, Naziratil Husna², Elfiana¹

Diterima: 23 April 2021. Disetujui: 04 Mei 2021. Dipublikasi: 30 Juni 2021

ABSTRAK. Tahun 2020 tepatnya bulan maret awal mula nya virus covid -19 terjangkit di Indonesia dan menyebar hingga ke Provinsi Aceh, dampak COVID-19 sangat terasa di Aceh khususnya para pekerja harian dan pedagang yang mengalami dampak langsung akibat COVID-19 sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Aceh terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Aceh yang disebabkan oleh virus COVID-19. Penelitian ini mengkaji indeks harga konsumen, nilai tukar petani, ekspor dan impor, transportasi udara dan laut, wisatawan mancanegara, dan tingkat persentase peminat hotel dan penginapan. Terjangkitnya virus COVID-19 di Aceh mengakibatkan beberapa sektor menurun baik dari segi pendapat maupun peminatnya seperti transportasi udara dan laut selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan penumpang dikarenakan pada awal tahun 2020 Aceh menerapkan pembatasan wilayah sehingga pendatang dari luar tidak bisa masuk ke Aceh, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak sosial peningkatan angka tersuspek virus COVID-19. Di akhir tahun 2021 nilai tukar petani mengalami peningkatan pada bulan Agustus ke September sebesar 0,90% namun secara garis besar Aceh mengalami deflasi mencapai 0,20 % dan secara nasional 0,40 % sedangkan salah satu Kabupaten di Aceh mengalami inflasi yang sangat tinggi yaitu Kabupaten Lhokseumawe mencapai 2,53 %. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Aceh tidak stabil sehingga mengharuskan Aceh untuk lebih siap menghadapi pandemi COVID-19 sehingga kondisi ekonomi dan sosial dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci: Dampak, COVID-19, Ekonomi Makro, Sosial

ABSTRACT. In March 2020, to be precise, the first time the covid-19 virus was infected in Indonesia and spread to Aceh Province, the impact of COVID-19 was felt in Aceh, especially daily workers and traders who were directly affected by COVID-19 resulting in macroeconomic conditions and social problems in Aceh are disrupted. This study aims to determine the macroeconomic and social conditions in Aceh caused by the COVID-19 virus. This study examines the consumer price index, farmers' exchange rates, exports and imports, air and sea transportation, foreign tourists, and the percentage level of interest in hotels and inns. The outbreak of the COVID-19 virus in Aceh resulted in several sectors declining both in terms of opinion and interest, such as air and sea transportation during the COVID-19 pandemic, which experienced a decrease in passengers because at the beginning of 2020 Aceh implemented regional restrictions so that migrants from outside could not enter Aceh, p. This is done to minimize the social impact of increasing the number of suspected cases of the COVID-19 virus. At the end of 2021 the farmer exchange rate increased from August to September by 0.90%, but in general Aceh experienced deflation reaching 0.20% and nationally 0.40% while one of the districts in Aceh experienced very high inflation, namely Lhokseumawe Regency reached 2.53%. This illustrates that macroeconomic and social conditions in Aceh are unstable, requiring Aceh to be better prepared to face the COVID-19 pandemic so that economic and social conditions can be handled properly.

Keyword: Impact, COVID-19, Macroeconomics, Social

Pendahuluan

Eropa dan Amerika Utara merupakan pusat pandemi COVID-19, dengan jumlah kasus dan kematian sudah melampaui China yang merupakan negara pertama yang tersuspek virus COVID-19. Amerika Serikat menempati posisi teratas yang memiliki kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus per 30 Maret 2020 kemudian diikuti oleh negara Spanyol dengan 6.549 kasus baru, serta negara Italia memiliki tingkat suspek paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. (WHO, 2020). Sedangkan keberadaan

covid -19 di Indonesia diketahui pada awal bulan maret tahun 2020 dengan besaran angka kematian mencapai 136 kasus (Kemenkes, 2020). Angka terjangkit COVID-19 di Indonesia merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara mencapai 8,9% (WHO, 2020).

Virus COVID-19 dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar ke 190 negara yang ada di dunia, virus COVID-19 dapat menyebabkan kematian pada manusia karena menyerang saluran pernafasan manusia yang mengakibatkan kerusakan pada paru-paru dan kekurangan oksigen (Susilo *et al.*, 2020). Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada hidup dan mati manusia akan tetapi juga berdampak pada ekonomi dan sosial, Indonesia berada pada status siaga darurat bencana COVID-19 sehingga diberlakukan pembatasan maupun peringatan dari pihak

✉ Naya Desparita
putra.agri.2018@gmail.com

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Almuslim, Bireuen, Aceh, Indonesia.

pemerintah untuk mengurangi dampak terkontaminasi virus COVID-19 (Kemenkes RI, 2020).

Seperti yang terjadi di salah satu Provinsi yang terdapat di Indonesia yaitu Aceh, corona virus disease 2019 atau sering disebut COVID-19 dapat mengakibatkan Indonesia perlu siaga dan tanggap dikarenakan corona virus disease 2019 (COVID-19) memberi dampak yang sangat besar yang mencakup dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat (Kemenkes RI, 2020). Kondisi ekonomi secara makro dan kondisi sosial di Aceh sangat berdampak pada kondisi ekonomi pedagang khususnya walaupun secara garis besar hanya beberapa kabupaten yang berdampak sehingga mengakibatkan terjadinya deflasi dan inflasi di Aceh pada akhir tahun 2021.

Untuk meminimalisir penyebaran virus covid - 19 agar seluruh kondisi baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik menjadi stabil kembali maka pemerintah menerapkan kebijakan social distancing, physical distancing bagi masyarakat (Hadiwardoyo, 2020). Pemberlakuan *social distancing* dan *physical distancing* satu sisi mampu menekan penyebaran virus namun disisi lain menyebabkan dampak kerugian bagi para pedagang, buruh dan tenaga kerja perusahaan swasta seperti berkurangnya aktivitas jual beli mengakibatkan sebagian besar pedagang harus gulung tikar akibat kebijakan ini, dengan demikian kondisi ekonomi secara makro dan sosial masih terganggu akibat keberadaan virus COVID-19 ini. Hal yang seperti ini perlu penanggulangan dan aksi cepat pemerintah sehingga dua sisi dapat tercapai baik dari sisi menekan penyebaran COVID-19 maupun dari segi dampak sosial dan ekonomi saat ini.

Bahan dan Metode

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kajian studi kepustakaan (*literature review*) terkait permasalahan pandemi COVID-19. Studi kepustakaan adalah studi yang mengkaji objek penelitian dari kepustakaan, jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa serta data statistika (Puteri, 2020). *Literature review* ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Aceh yang dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19.

Hasil dan Pembahasan

Pada akhir tahun 2021 ibu Kota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh mengalami deflasi sebesar

0,13%(BPS Aceh, 2021). Deflasi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat daya beli uang yang meningkat dalam masa tertentu dikarenakan jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan jumlah barang maupun jasa. Deflasi akan berdampak buruk pada sistem perdagangan baik dari segi produsen maupun pembeli, dan berdampak juga terhadap peningkatan pengangguran dikarenakan pada saat pandemi buruh dan tenaga kerja lepas yang memperoleh balas jasa disaat mereka aktif bekerja sehingga mengakibatkan ketika pandemi COVID-19 terjadi di Aceh para pedagang, buruh dan tenaga kerja harian lepas sangat berdampak dan sangat buruk kondisi ekonomi dan sosialnya, seperti dua kota lainnya selain Kota Banda Aceh yaitu Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh yang mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,16% dan 0,59%.

Secara garis besar, Provinsi Aceh mengalami deflasi sebesar 0,20 persen. Sedangkan, secara nasional mengalami deflasi sebesar 0,04%(BPS Aceh 2021). Dampak pandemi COVID-19 selain berdampak terhadap terjadinya deflasi, Aceh juga mengalami inflasi pada akhir tahun 2021, sebagaimana data dari BPS Aceh, 2021 menyatakan bahwa Inflasi "*year on year*" atau perbandingan harga pada bulan September 2021 dengan bulan September 2020 maka Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 2,07%, Kota Lhokseumawe sebesar 2,53%, Kota Meulaboh sebesar 1,48% dan Aceh sebesar 2,12%. Sedangkan, inflasi antartahun nasional sebesar 1,60%.

Secara teoritis inflasi merupakan suatu keadaan kesenjangan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung lama dan terus menerus, maka disaat harga barang dan jasa disuatu negara meningkat maka akan terjadinya inflasi. Peningkatan harga barang dan jasa mampu menyebabkan rendahnya nilai uang (BPS, 2021). Inflasi maupun deflasi merupakan turunan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagaimana inflasi mencerminkan menggambarkan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap perubahan nilai aset, kewajiban, dan nilai transaksi bisnis maupun sistem perdagangan. Inflasi berkaitan erat dengan rendah dan tingginya penawaran maupun permintaan akan barang yang mempengaruhi daya beli dari konsumen sehingga ada nilai tukar valuta asing yang dinilai pada saat inflasi tumbuh.

Inflasi masih dikategorikan dalam hal yang aman jika berada pada kategori inflasi yang rendah karena pada saat inflasi rendah dan stabil pertumbuhan ekonomi akan mampu bertumbuh dan bertahan lama secara berkesinambungan

sehingga kesejahteraan mampu tercapai. Aceh saat ini mengalami dua kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan jika dikaji secara makro berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) atas dasar data BPS Aceh maupun Indonesia yaitu mengalami inflasi maupun deflasi sehingga Aceh penting untuk menjaga kestabilan baik inflasi dan deflasi.

Pertumbuhan inflasi maupun deflasi yang tidak stabil berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Aceh dikarenakan jika inflasi terjadi dalam waktu yang lama akan menurunkan pendapatan masyarakat dan berdampak pada standar hidup masyarakat. Inflasi yang tidak stabil akan menyebabkan permasalahan pada sistem perdagangan yang akan menciptakan ketidakpastian terhadap keputusan baik produsen maupun pembeli, meresahkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi dan pada hasil akhir akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dinyatakan oleh (Anisah, 2021) dalam kajiannya menganalisis dampak pandemi COVID-19 di Kota Semarang menyatakan bahwa kota tersebut juga mengalami inflasi maupun deflasi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana inflasi di kota tersebut fluktuatif pada tahun 2019 dan akhir 2020 sedangkan pada awal 2020 terjadi deflasi yang lumayan tinggi akibat harga kelompok makanan.

Deflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh merupakan deflasi yang disebabkan oleh menurunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,31%, serta pada kelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 0,03%. Sementara deflasi tertinggi di Kota Lhokseumawe juga disebabkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,46%. Dan begitu juga dengan deflasi di Kota Meulaboh disebabkan oleh menurunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,02% (BPS Aceh). Harga komoditas bulan September 2021 di Provinsi Aceh merupakan komoditas yang memberi angka inflasi tertinggi yaitu pada komoditas ikan tuna, sewa rumah, angkutan udara, minyak goreng, dan jeruk. Sedangkan angka deflasi tertinggi yaitu pada komoditas ikan tongkol/ ambu-ambu, bawang merah, telur ayam ras, udang basah, dan ikan dencis (BPS Aceh, 2021)

Kondisi Ekonomi secara makro dan sosial di Aceh tidak terlepas juga dari Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Aceh dilihat pada bulan September 2021 sebesar 103,26. Nilai Tukar Petani meningkat sebesar 0,90% dibandingkan dengan

bulan Agustus 2021 sebesar 102,34. Hal ini menyebabkan indeks yang diperoleh petani (It) meningkat sebesar 0,85%, sementara indeks yang dibayar (Ib) petani menurun sebesar 0,05% (BPS, Aceh 2021). Nilai Tukar Petani di Provinsi Aceh meningkat pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Persentase kenaikan tertinggi diperoleh oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,16%. Sementara terjadi penurunan subsektor tanaman pangan dan subsektor hortikultura masing-masing turun sebesar 0,10% dan 0,004%. Provinsi Aceh juga mengalami deflasi akibat menurunnya harga komoditas sayur-sayuran seperti cabe merah, bawang merah, kacang panjang dan ketimun, Sementara lima kategori komoditas lainnya mengalami inflasi dengan peningkatan tertinggi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,59%, dan 2 kategori lainnya yang berhubungan dengan bidang sosial yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya serta pendidikan tidak mengalami perubahan.

Pada bulan september 2021, walaupun nilai tukar petani meningkatkan tidak menutup kemungkinan untuk harga gabah kualitas di tingkat petani mengalami penurunan sebesar 1,45% atau senilai Rp. 69 menjadi 4.688 rupiah per kilogram. Sedangkan di tingkat penggilingan harga gabah juga turun sebesar 1,43% atau sebesar Rp. 69 menjadi 4.762 rupiah per kilogram. Penurunan harga gabah pada bulan September tidak berdampak signifikan akibat pengaruh pandemi COVID-19 dikarenakan harga gabah dilihat dari kualitas gabah yang dihasilkan sehingga pandemi COVID-19 pada tingkat harga gabah tidak berdampak.

Kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Aceh akibat pandemi COVID-19 juga berdampak pada nilai ekspor Aceh pada Agustus 2021 juga meningkat 41,50% jika dibandingkan dengan ekspor pada Agustus 2020 (US\$ 23,85 juta). Sementara itu, nilai impor Aceh Agustus 2021 sebesar US\$ 7,76 juta atau meningkat 341,25% dibandingkan nilai impor bulan sebelumnya. Begitu pula jika dibandingkan dengan nilai impor Agustus 2020 (US\$ 0,06 juta), impor Aceh mengalami peningkatan hingga 13.401,39%. Sedangkan total realisasi impor mencapai US\$ 39,13 juta atau sebesar 90,58% terhadap total realisasi impor tahun 2020 (US\$ 25,77 juta). Neraca perdagangan luar negeri Aceh kondisi Agustus 2021 mengalami surplus sebesar US\$ 25,98 juta. Capaian tersebut menurun dari kondisi bulan Juli 2021 yang juga mengalami surplus sebesar US\$ 30,76 juta.

Jumlah penumpang angkutan udara pada Agustus 2021 sebanyak 13.353 orang. Angka tersebut menurun 3,02% terhadap Juli 2021. Kemudian jika dibandingkan dengan Agustus 2020 menurun sebesar 34,95 persen. Perkembangan aktivitas penumpang selama bulan Juli - Agustus 2021 (m to m) dua bandara utama mengalami penurunan, penurunan terdalam terjadi di Bandara Malikussaleh -100%.

Sementara jika dibandingkan pada keempat bandara utama mengalami penurunan, yaitu Bandara Malikussaleh dan bandara Cut Nyak Dhien paling rendah -100%. Penurunan peminat pada transportasi udara diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 dimana setiap Provinsi menerapkan *social distancing*, *physical distancing* untuk menekan angka COVID-19, Aceh salah satu Provinsi yang membatasi akses transportasi udara dan laut mengingat diawal terjadinya pandemi COVID-19 jumlah masyarakat Aceh yang tersuspek disebabkan oleh perjalanan dinas dari luar daerah maupun aktivitas yang berhubungan dengan khalayak ramai, sehingga Jumlah penumpang angkutan laut pada Agustus 2021 di Provinsi Aceh menurun sebesar 18,47% dibandingkan pada bulan Juli 2021.

Perkembangan jumlah penumpang angkutan laut mengalami penurunan di empat pelabuhan laut besar dengan penurunan terbesar terjadi di pelabuhan Sinabang (50,90%). Sedangkan tiga pelabuhan besar mengalami peningkatan, hanya pelabuhan Sinabang mengalami penurunan (-93,84%).

Minat masyarakat untuk memakai jasa menginap di Hotel berbintang di Provinsi Aceh pada bulan Agustus 2021 sebesar 25,41%, mengalami penurunan sebesar 1,47% dibandingkan bulan Juli 2021, jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,02%. Sementara akomodasi lainnya pada bulan Agustus 2021 sebesar 21,24%, mengalami peningkatan sebesar 2,16% jika dibandingkan dengan bulan Juli 2021, namun mengalami penurunan sebesar 0,50% dibandingkan dengan bulan Agustus 2020 (BPS Aceh, 2021).

Penurunan ini terjadi akibat dari dampak pandemi COVID-19 dikarenakan tidak ada wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui pintu kedatangan di Provinsi Aceh pada bulan Agustus 2021, hal ini yang menyebabkan penurunan sebesar 100% dibandingkan bulan Agustus 2020. rata-rata lama menginap tamu asing di hotel bintang dan jasa akomodasi lainnya adalah

0 dikarenakan tidak adanya tamu asing yang menginap.

Hal ini diketahui bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak secara agregat terhadap kondisi ekonomi makro dan kondisi sosial Provinsi Aceh, sehingga Provinsi Aceh untuk meminimalisir dampak negatif ini maka dilakukan pencegahan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Aktivitas masyarakat sudah mulai aktif seperti dipusat perdagangan, pendidikan dan transportasi namun tetap menerapkan pembatasan-pembatasan untuk meminimalkan resiko terjangkitnya virus COVID-19 yang meningkat drastis.

Pemerintah Aceh mengambil andil dalam pelaksanaan vaksinasi secara berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Aceh diberbagai khalayak sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aktif dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan demikian dampak negatif COVID-19 dapat diatasi sebagaimana harapan kita dan deflasi dan juga inflasi tidak terjadi lagi dalam waktu yang lama dengan begitu menjadikan kondisi ekonomi makro yang stabil yang menunjang kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial yang baik.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Provinsi Aceh, dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa Provinsi Aceh secara agregat mengalami deflasi mencapai 0,20% dan secara nasional 0,40% sedangkan salah satu Kabupaten di Aceh mengalami inflasi yang sangat tinggi yaitu Kabupaten Lhokseumawe mencapai 2,53%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi ekonomi secara makro dan sosial di Aceh tidak stabil dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengambil keputusan secara pasti untuk konsumsi, investasi maupun produksi. Dengan demikian untuk kembali stabil pemerintah harus mengaktifkan kembali sektor perdagangan, pendidikan, transportasi dan akomodasi serta sektor jasa lainnya untuk menunjang agar tidak terjadi inflasi maupun deflasi dengan harapan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Anisah, L. (2021). Bedah Inflasi Kota Semarang di Masa Pandemi. *Jurnal Riptek*, Vol. 15 (1), 1-8.
- BPS Aceh. (2021). Analisis Isu Terkini Ekonomi Makro dan Sosial Provinsi Aceh.
- Puteri, R. N. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, (2).
- Susilo, A., Cleopas M.R., Ceva.W.P., Widayat.D.S., Mira. Y., Herikurniawan., Robert. S., Gurmeet.S., Leonard. N., Erni. J.,

Nelwan., Lie L.C., Alvina. W., Edwin. W., Bramantya. W., Maradewi. M., Firda. A., Cynthia. O. M. J., Evy. Y., Coronavirus Disease (2019). *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, vol. 7, (1).